

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan bab IV dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1 Perbandingan Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten Sijunjung sebelum dan sesudah terjadinya pemekaran daerah.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan rasio sebagai berikut :

a. Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan perhitungan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sijunjung tahun 2002 -2006 dapat diketahui bahwa Kabupaten Sijunjung memiliki kriteria Efektif yaitu nilai mencapai diatas 100% yaitu sebesar 117%. Dimana menurut Mohamad Mahsun (2012:187), rasio ini, masuk kedalam kriteria efektif, yang berarti Pemerintah Daerah telah mampu merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Namun jika dilihat Efektifitas PAD Kabupaten Sijunjung 6 tahun setelah pemekaran, yaitu pada tahun 2010 – 2014 nilai rasio berada dibawah 100% yaitu hanya mencapai sebesar 60%. Nilai tersebut

berkriteria tidak efektif. Artinya adalah Kabupaten Sijunjung selama tahun 2010-2014 belum mampu mengelola Pendapatan Asli Daerah dengan baik.

b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dari tahun 2002 – 2006 dapat diketahui Kabupaten Sijunjung memiliki kriteria efisien. Dimana nilai rasio kurang dari 100% yaitu sebesar 87%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Dari hasil rasio tersebut dapat diketahui bahwa, kabupaten Sijunjung telah mampu merealisasikan pengeluaran untuk memperoleh pendapatan yang diterima dengan baik.

Jika dilihat setelah terjadinya pemekaran yaitu pada tahun 2010 – 2014. Berdasarkan hasil perhitungan dapat diketahui nilai rasio keuangan daerah kabupaten Sijunjung mengalami fluktuasi. Nilai rata - rata rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan sebesar 72%. Nilai tersebut masih termasuk kedalam kriteria efisien, yang berarti daerah telah mampu mengelola pengeluaran dan pendapatan dengan baik.

c. Rasio Efisiensi Belanja

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata rasio efisiensi belanja Kabupaten Sijunjung tahun 2002-2006 dapat diketahui bahwa Kabupaten Sijunjung memiliki kriteria efisien yaitu sebesar 89%. Dari kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sijunjung telah mampu

merealisasikan pengeluaran daerah yang efisien dibandingkan dengan yang dianggarkan artinya realisasi belanja yang telah terealisasi tidak melebihi anggaran belanja yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio Kabupaten Sijunjung 6 tahun setelah terjadinya pemekaran yaitu tahun pada 2010 - 2014, dapat diketahui rata – rata nilai rasio efisiensi belanja daerah Kabupaten Sijunjung adalah sebesar 40%. Nilai tersebut tergolong sangat efisien. Jika dibandingkan dengan sebelum terjadinya pemekaran. Dapat disimpulkan, Kabupaten Sijunjung mengalami peningkatan efisiensi belanja setelah terjadinya pemekaran.

d. Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan hasil dari rasio pertumbuhan pendapatan Kabupaten Sijunjung tahun 2002 – 2006, nilai rata-rata pertumbuhannya sebesar 17%, nilai tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan belanjanya yaitu sebesar 35%. Dilihat dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2002 – 2006 pertumbuhan belanja Kabupaten Sijunjung lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatannya.

Dilihat 6 tahun setelah pemekaran, rata – rata pertumbuhan pendapatan Kabupaten Sijunjung dari tahun 2010 sampai dengan 2014 yaitu sebesar 15%. Nilai tersebut lebih 2% rendah dibandingkan pertumbuhan pendapatan saat sebelum terjadinya pemekaran. Namun

jika dibandingkan dengan pertumbuhan belanja pada tahun 2010 – 2014, nilai tersebut lebih baik dibandingkan peningkatan belanja yang hanya mencapai sebesar 10%. Dapat disimpulkan pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja Kabupaten Sijunjung 6 tahun setelah pemekaran yaitu dari tahun 2010 – 2014 mengalami penurunan, dibandingkan dengan sebelum terjadinya pemekaran.

e. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Sijunjung dari tahun 2002 – 2006 menunjukkan, kemampuan keuangan kabupaten Sijunjung masih sangat rendah sekali. Dilihat dari nilai rata-rata tidak mencapai 25% yaitu hanya sebesar 8%, yang berarti kemampuan keuangan daerah tersebut masih rendah sekali. Artinya adalah, daerah tersebut belum mampu membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri. Pola hubungan termasuk dengan pola instruktif dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pihak ekstern (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi) masih sangat tinggi.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah setelah pemekaran, Kabupaten Sijunjung untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masih sangat rendah sekali. Dilihat dari nilai rata-rata rasio dari tahun 2010-2014, nilai tidak mencapai 25%, hanya 7% yang berarti

kemampuan keuangan daerah tersebut masih sangat rendah sekali. Dengan pola hubungan instruktif, dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Setelah terjadinya pemekaran, dilihat dari hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah nilai rata-rata rasio kemandirian Kabupaten Sijunjung mengalami penurunan, dapat disimpulkan daerah tersebut belum mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik, dan masih bergantung pada bantuan pihak ektern (terutama bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi).

5.1.2 Perbandingan Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten Sijunjung Setelah terjadinya Pemekaran dengan Kabupen Dharmasraya

Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten Dharmasraya dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Kabupaten Dharmasraya setelah 5 tahun pemekaran yaitu tahun 2010-2014. Kabupaten Dharmasraya sebelumnya merupakan bagian dari daerah kabupaten Sijunjung. Pemekaran kabupaten Dharmasraya diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004. Adapun analisa yang dilakukan adalah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Hasil dari Analisis Rasio kabupaten Dharmasraya adalah sebagai berikut :

a. Rasio Efektivitas PAD

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektifitas PAD Kabupaten Dharmasraya. Nilai rata-rata rasio dari tahun 2010-2014 berada dibawah

100% yaitu hanya sebesar 38%. Kriteria nilai tersebut tidak efektif, artinya kabupaten Dharmasraya selama tahun 2010 – 2014 belum mampu mengelola Pendapatan Asli Daerah dengan baik.

Jika dilihat dari nilai rata-rata rasio efektifitas PAD, nilai rata-rata Kabupaten Sijunjung setelah pemekaran lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata Kabupaten Dharmasraya, nilai rata-rata Kabupaten Sijunjung yaitu sebesar 60% sedangkan nilai rata-rata Kabupaten Dharmasraya hanya sebesar 38%. Kedua nilai tersebut berada dalam kategori tidak efektif. Namun, dapat disimpulkan Kabupaten Sijunjung setelah pemekaran lebih efektif dalam mengelola pendapatan asli daerahnya karena mempunyai nilai rata-rata rasio efektifitas PAD lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Dharmasraya.

b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Dharmasrya tahun 2010 – 2014 dapat diketahui rata – rata nilai rasio adalah 82%. Nilai tersebut termasuk kedalam kriteria efisien. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Dari hasil rasio tersebut dapat diketahui bahwa, Kabupaten Dharmasraya selama tahun 2010 – 2014 telah mampu merealisasikan pengeluaran untuk memperoleh pendapatan yang diterima dengan efisien.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten Sijunjung setelah terjadinya pemekaran, tingkat efisiensi keuangan daerah Kabupaten Dharmasraya berada dibawah tingkat efisiensi Kabupaten Sijunjung, nilai rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Sijunjung 72% sedangkan Kabupaten Dharmasraya 82%. Semakin kecil nilai rasio efisiensi keuangan daerah, berarti semakin efisien daerah tersebut dalam mengelola keuangan daerahnya.

c. Rasio Efisiensi Belanja

Berdasarkan hasil perhitungan rata – rata rasio efisiensi belanja Kabupaten Dharmasraya tahun 2010 – 2014 adalah 40% nilai tersebut memiliki kriteria sangat efisien. Dari kriteria tersebut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Dharmasraya telah mampu merealisasikan pengeluaran daerah dengan yang dianggarkan artinya realisasi belanja yang telah terealisasi tidak melebihi anggaran belanja yang ditetapkan.

Nilia rasio efisiensi belanja Kabupaten Sijunjung setelah terjadinya pemekaran sebesar 40%, dengan kriteria sangat efisien. Nilai tersebut sama dengan nilai rata-rata rasio efisiensi belanja Kabupaten Dharmasraya dan dengan kriteria sangat efektif, dapat disimpulkan kedua daerah tersebut jika dilihat dari rasio efisiensi belanja telah efisien dalam melakukan pengeluaran.

d. Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan hasil dari rasio pertumbuhan pendapatan Kabupaten Dharmasraya tahun 2010 – 2014, Nilai rata-rata pertumbuhan pendapatannya sebesar 11%, nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata pertumbuhan belanjanya yaitu sebesar 8%. Dilihat dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2010 – 2014 pertumbuhan pendapatan Kabupaten Dharmasraya lebih baik dibandingkan dengan pertumbuhan belanjanya.

Jika dibandingkan Nilai rata-rata pertumbuhan pendapatan Kabupaten Sijunjung lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Dharmasraya yaitu sebesar 19%, sedangkan Kabupaten Dharmasraya 13%. Begitu juga dengan nilai pertumbuhan belanja, Kabupaten Sijunjung mengalami pertumbuhan belanja lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Dharmasraya. Nilai rata-rata pertumbuhan belanja Kabupaten Sijunjung setelah pemekaran 12%, sedangkan nilai rata-rata pertumbuhan belanja Kabupaten Dharmasraya 9%. Dilihat dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan, Kabupaten Sijunjung telah mampu mengelola daerah dengan baik dengan rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Dharmasraya.

e. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Dharmasraya dari tahun 2010 – 2014 nilai rata-rata rasio adalah sebesar 12%, nilai tersebut termasuk kedalam kategori kemampuan keuangan daerah tersebut rendah sekali. Dengan pola hubungan instruktif, yaitu dimana peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah. Dapat disimpulkan jika dilihat dari hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Dharmasraya 6 tahun setelah berdirinya daerah belum mampu melaksanakan otonomi.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten Sijunjung setelah terjadinya pemekaran, nilai rata-rata rasio kemandirian Kabupaten Dharmasraya lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Sijunjung setelah terjadinya pemekaran. Dapat disimpulkan, kedua daerah sama-sama belum mampu melaksanakan otonomi dengan baik, dan masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat atau provinsi.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

- a. Pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung diharapkan mampu meningkatkan mobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Karena jika dilihat dari hasil perhitungan rasio

efektifitas pendapatan asli daerah Kabupaten Sijunjung setelah pemekaran mengalami penurunan sebanyak 57%.

- b. Pemerintah Kabupaten Sijunjung diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan.
- c. Efisiensi belanja Kabupaten Sijunjung berdasarkan perhitungan rasio efisiensi belanja, berada pada kriteria efisien yaitu nilai rata-rata sebesar 89%, berdasarkan nilai tersebut diharapkan pemerintah Kabupaten Sijunjung dapat mempertahankan, dan lebih meningkatkan efisiensi pengeluaran.
- d. Untuk Kabupaten Dharmasraya diharapkan juga mampu mengoptimalkan mobilisasi/merealisasikan penerimaan Pendapatan Asli Daerahnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengoptimalan penerimaan PAD tersebut agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan.
- e. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya diharapkan bisa mempertahankan efisiensi dalam pengeluaran atau belanja daerahnya. Karena jika dilihat dari hasil perhitungan rasio efisiensi belanja, nilai rasio Kabupaten Dharmasraya sebesar 40% dengan kriteria sangat efisien dalam merealisasikan pengeluaran/belanja tidak melebihi anggaran yang telah ditetapkan.